

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual	11
1.5.1. Hak Masyarakat Adat	11
1.5.2. <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> (UNDRIP) sebagai Rezim Internasional	14
1.6. Asumsi Penelitian	18
1.7. Kerangka Analisis	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Penerapan Prinsip <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i> (UNDRIP) dalam Konteks Global Hak Masyarakat Adat	22
2.2. Warisan Budaya dan Hak Masyarakat Adat di Papua Barat.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Desain Riset	36
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3. Teknik Analisis Data.....	39
3.4. Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Kondisi Masyarakat Adat di Papua Barat dan Kerangka Hukum Nasional Indonesia dalam Mendukung Prinsip <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC)	44
4.1.1 Gambaran Umum Masyarakat Adat di Papua Barat	45
4.1.2 Pengakuan Konstitusi terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia...	48
4.1.3 Regulasi Sektorial dan Posisi FPIC dalam Hukum Positif Indonesia ..	50

4.1.4	Dampak UU Cipta Kerja terhadap Penerapan Prinsip FPIC	54
4.1.5	Kesenjangan antara Kerangka Hukum Nasional dan Standar UNDRIP	
	57	
4.2	Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Papua Barat Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja	60
4.2.1	Indikator <i>Free, Prior, and Informed Consent</i> (FPIC) sebagai Kerangka Evaluasi Empiris.....	61
4.2.2	Proyek Pertambangan di Papua Barat	65
4.2.3	Pelanggaran Hak Masyarakat Adat di Papua Barat tahun 2020-2025	71
4.3	Hambatan dan Tantangan Indonesia dalam Memenuhi Hak Masyarakat Adat di Papua Barat	75
4.3.1	Ketiadaan Peraturan Khusus dan Konflik Regulasi	75
4.3.2	Dominasi Agenda Pembangunan Ekstraktif.....	80
4.3.3	Lemahnya <i>Political Will</i> dalam penerapan prinsip <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC)	82
4.3.4	Ketergantungan Ekonomi pada Investasi Ekstraktif	84
4.3.5	Stigmatisasi dan Diskriminasi Struktural terhadap Masyarakat Adat Papua Barat.....	87
4.3.6	Kegagalan Sistemik FPIC sebagai Produk Hambatan Berlapis yang Saling Memperkuat	89
BAB V KESIMPULAN		94
DAFTAR PUSTAKA.....		96
LAMPIRAN – LAMPIRAN		106